

Ali Usman, Ketua PATAKA

Langkah Strategis Kebijakan: Menghitung Neraca Jagung dan Menimbang Kuota Ekspor Pasar ASEAN

DASAR PEMIKIRAN

Supply-demand jagung nasional tidak seimbang sehingga persoalan muncul bagi petani, *trader* atau pengepul. Permintaan jagung 90 persen diterima oleh peternak mandiri (*layer*) dan pabrik pakan (*feedmill*). Hingga kini permintaan pasar dalam negeri mengalami penurunan drastis. Kelebihan pasokan ini, dianggap surplus sampai akhir tahun mendatang. Untuk meminimalisir kerugian petani dan *trader*, mau tidak mau harus mencari pasar ekspor di kawasan regional ASEAN.

KAJIAN EMPIRIS

Selama ini, peran lembaga stabilisator Perum BULOG belum difungsikan secara maksimal oleh pemerintah. Terutama pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) sehingga tidak ada wewenang untuk tata kelola stok jagung nasional. Namun akhir-akhir ini BULOG ditugaskan secara mendadak pengadaan, pengelolaan dan penyaluran kepada peternak mandiri atau *feedmill*. Ditengah pengadaan jagung penuh di gudang, tidak sebanding permintaan sehingga jagung berpotensi turun mutu dan mengalami kerugian yang sangat besar.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Data jagung nasional seringkali terjadi polemik karena adanya perbedaan data yang tidak sinkron antar K/L terkait. Maka proses KSA Jagung perlu segera diselesaikan, agar bisa menjadi satu data jagung oleh wali data BPS.
2. Target swasembada jagung dan menjadi negara pengekspor pada tahun 2022-2024 perlu didukung dengan peningkatan bantuan Saprotan seperti pupuk, pestisida dan bibit hibrida agar mampu meningkatkan produksi jagung.
3. Pemerintah perlu menghimbau agar stakeholder untuk melaporkan jumlah stok yang ada agar dapat diketahui mengenai Cadangan Jagung Nasional (CJN).

4. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kembali mengenai Industri Pakan Ternak agar tidak terkonsentrasi di pulau Jawa. Karena tanaman jagung tersebar di semua wilayah sehingga membutuhkan transportasi yang memerlukan biaya tidak sedikit.
5. Wacana ekspor perlu melihat neraca data per bulan yang selalu minus (2021). Perlu diperhatikan kondisi harga dunia cenderung turun, dan memperhatikan ketersediaan dan kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai terjadi kekurangan jagung.
6. Ketika terjadi Jagung surplus maka pasca panen harus dipertimbangkan paling tidak bisa disimpan di Silo yang baik agar bisa bertahan, sehingga jika stok ada dan dikuasai maka akan menjaga stabilitas harga jagung.
7. Peluang ekspor sangat terbuka, dengan catatan tidak ada penyerapan jagung di petani. Terjadi penurunan harga terus menerus karena kebutuhan domestik terpenuhi. Ekspor jagung segera dilakukan dengan cepat dan jangan terlalu lama mengambil keputusan.
8. Saat ini serapan dalam negeri mengalami titik jenuh atau penuh di Gudang-gudang pedagang. Pasalnya tidak ada pembelian jagung, akhirnya mengalami penurunan harga, sehingga berdampak ke petani dan maka perlu dilakukan ekspor.
9. HAP jagung perlu di pertimbangkan kembali karena dianggap tidak adil. Pasalnya harga jagung naik Rp6.000/Kg di petani dipaksa turun HAP karena disubsidi pemerintah.
10. Pemerintah perlu membangun *food stock exchange* layaknya bursa efek Indonesia. Sebab Indonesia memakai referensi harga jagung dari bursa luar negeri, tetapi juga adopsi harga HAP. Sehingga stabilisasi harga pangan nasional tidak lagi pasar murah.
11. Momentum isu ekspor dapat dideklarasikan menjadi isu nasional, bahwa Indonesia mampu menjadi eksportir jagung kawasan ASEAN. Misalnya BULOG dan ID FOOD perlu bangun gudang di Malaysia.
12. Ombudsman (ORI) memantau perkembangan data pangan. Serta merespon cepat aduan masyarakat yang mengalami kerugian secara materil maupun immateril. Kerugian akibat basis data yang kurang valid, sehingga pemerintah salah mengambil keputusan. ORI dapat mencegah maladministrasi dan memberi tindakan korektif kepada pemerintah, BUMN dan pelaku usaha selaku pemberi pelayanan publik.